PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUBUNGAN PACARAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

UNDERGRADUATE THESIS
Submitted as one of the requirements to obtain Sarjana Hukum

By:

Amira Nurra Khairunnisa Tabroni

017201905010

FACULTY OF HUMANIORA
LAW STUDY PROGRAM
CIKARANG
2023

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Hubungan Pacaran Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

ORIGINALITY REPORT

14%	14%	8%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	8%
2	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	2%
3	journal.uns.ac.id Internet Source	1%
4	ojs.unida.ac.id Internet Source	1%
5	Yustisianto, Agus Irawan. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1%
6	repository.unika.ac.id Internet Source	1%

www.jogloabang.com

GPTZero
Your text is likely to be written entirely by a human
There is a 0% probability this text was entirely written by AI

GPTZero
Stats
Average Perplexity Score: 539.867
Burstiness Score: 251.337

GPTZero
Stats
Average Perplexity Score: 1056.487
Burstiness Score: 1282.614

GPTZero
Stats
Average Perplexity Score: 505.000
Burstiness Score: 294.904

GPTZero
Stats
Average Perplexity Score: 752.833
Burstiness Score: 663.102

GPTZero
Stats
Average Perplexity Score: 631.533
Burstiness Score: 304.286

ABSTRACT

Cases of sexual violence that befall women during dating relationships n Indonesia are still high. The Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (Kemen PPPA) noted that violence against women and children has increased in the last three years. The number of reported cases of sexual violence against women increased from 10,247 cases in 2021 to 14,414 cases throughout 2022. Data from the National Commission on Violence Against Women shows that the level of sexual violence experienced by women continues to increase during dating relationships. The aim of this research is to explain and describe the legal protection for women victims of sexual violence in dating relationships and the relevance of Law No. 12 of 2022 regarding the Crime of Sexual Violence in protecting women victims of sexual violence in dating relationships. This research uses a normative research method with a juridical approach. The results of this research show how the legal protection provided to women who experience sexual violence while in a dating relationship is not optimal. Punishment of perpetrators of sexual violence refers to the Criminal Code. In general, in cases of sexual violence in dating, the perpetrator can be threatened with legal sanctions under the articles of the Criminal Code regarding obscenity (Articles 289-296). The government's establishment of the Sexual Violence Crime Law, which has become a complete law in providing preventive and repressive legal protection, has strong relevance in providing legal protection for women who are victims of sexual violence crimes while in a dating relationship.

Keywords: Dating, sexual violence, legal protection, legal certainty.

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan pada saaat menjalani hubungan pacaran di Indonesia masih tinggi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat, kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Angka laporan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan meningkat dari 10.247 kasus pada 2021. Menjadi 14.414 kasus sepanjang tahun 2022. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan terus meningkatnya tingkat kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan saat menjalan hubungan pacaran.

Tujuan penelitian ini menjelaskan dan mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual dalam hubungan pacaran dan relevansi Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam melindungi perempuan korban kekerasan seksual dalam hubungan pacaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana Perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan yang mengalami tindak kekerasan seksual pada saat menjalani hubungan pacaran belum lah optimal. Pemidanaan terhadap pelaku tindak kekerasan seksual yang mengacu kepada KUHP Secara umum pada kasus kekerasan seksual dalam pacaran, pelaku dapat diancam dengan sanksi hukum dengan pasal-pasal KUHP pasal pencabulan (Pasal 289-296). Dibentuknya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh pemerintah yang menjadi undang-undang secara lengkap dalam memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif memiliki relevansi yang kuat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual saat menjalani hubungan pacaran.

Kata Kunci*: *Pacaran,kekerasan seksual, perlindungan hukum, kepastian hukum.

DAFTAR ISI

PANEL OF EXXAMINER APPROVAL ii
STATEMENT OF ORIGINALITY iii
SCIENTIFIC PUBLICATION APPROVAL FOR ACADEMIC iv
ADVISOR'S APPROVAL FOR PUBLICATION v
TURNITIN vi
GPT ZERO SCORE CHECK vii
ABSTRAK viii
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Perumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Kerangka Teoritis 7
F. Metode Penelitian 8
1. Spesifikasi Penelitian 8
2. Sumber Data 9
G. Sistematika Penulisan 10

BAB 2 PENDEKATAN TEORITIS 11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 11
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 14
2.3 Tinjauan Umum Tentang Korban 16
2.4 Tinjauan Umum Tentang Hubungan Pacaran 18

BAB 3 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUBUNGAN PACARAN 22

BAB 4 RELEVANSI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM MELINDUNGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM HUBUNGAN PACARAN 34

BAB 5 PENUTUP 46
5.1 Kesimpulan 46
5.2 Saran 46